



Authority Fragmentation in Blue Economy Governance in Coastal Singkawang

Qurnia Indah Permata Sari^{1)*}, Taufik Akbar²⁾

¹⁾²⁾ Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Malang, Indonesia

Fathul Bari³⁾, Selamat Daroini⁴⁾

³⁾⁴⁾ Indonesian Green Institute, Jakarta, Indonesia

Email correspondence : gurniaindahpermatasari@ub.ac.id*

Abstract

Purpose: This study analyzes governance challenges in *blue economy* implementation in coastal Singkawang by examining authority fragmentation, inter-actor coordination, and coastal community livelihoods.

Design: This research uses a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The informants included representatives of municipal government agencies, provincial government agencies, fisher organizations, fishers, fish traders, and seafood processing actors. The data were analyzed thematically to identify patterns of authority distribution, inter-agency coordination, policy implementation, environmental management, conservation, and fisher livelihoods.

Findings: The findings show that *blue economy* implementation in Singkawang is shaped by multi-level and cross-sectoral governance. Although authority over marine areas lies with the provincial and central governments, the municipal government continues to play a strategic role as the closest actor to coastal communities through fisher guidance, administrative facilitation, fuel recommendation services, seafood processing support, fish market governance, and coastal environmental management. Inter-agency coordination has developed through marine waste management, fishery product diversification training, and fisher group assistance, but institutional strengthening is still needed to ensure more consistent and sustainable implementation.

Practical Implication: The findings highlight the need to strengthen coordination among municipal, provincial, and central governments, particularly in fisher services, seafood value-added activities, marine waste management, and mangrove-based coastal conservation.

Originality/value: This study contributes to *blue economy* governance literature by showing that implementation in a non-metropolitan coastal city is shaped not only by marine resource potential, but also by authority fragmentation, coordination capacity, and the municipal government's bridging role.

Keywords: *Blue Economy*; Coastal Governance; Authority Fragmentation; Fishers; Singkawang

Paper type: Case Study

Fragmentasi Kewenangan dalam Tata Kelola *Blue Economy* di Pesisir Singkawang

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini menganalisis tantangan tata kelola *blue economy* di pesisir Singkawang dengan menyoroti fragmentasi kewenangan, koordinasi antaraktor, dan penghidupan masyarakat pesisir.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Informan penelitian mencakup unsur pemerintah kota, pemerintah provinsi, organisasi nelayan, nelayan, pedagang ikan, dan pelaku pengolahan hasil laut. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, implementasi kebijakan, pengelolaan lingkungan, konservasi, dan penghidupan nelayan.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* di Singkawang dipengaruhi oleh tata kelola lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor. Meskipun kewenangan pengelolaan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kota tetap memiliki peran strategis sebagai aktor yang paling dekat dengan masyarakat pesisir melalui pembinaan nelayan, fasilitasi administrasi, rekomendasi BBM, dukungan pengolahan hasil laut, tata kelola pasar ikan, dan pengelolaan lingkungan pesisir. Koordinasi antarlembaga telah berkembang melalui pengelolaan sampah laut, pelatihan diversifikasi produk perikanan, dan pendampingan kelompok nelayan, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan agar lebih konsisten dan berkelanjutan.

Implikasi Praktis: Temuan ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, terutama dalam pelayanan nelayan, peningkatan nilai tambah hasil laut, pengelolaan sampah laut, dan konservasi pesisir berbasis mangrove.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* di kota pesisir nonmetropolitan tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya laut, tetapi juga oleh fragmentasi kewenangan, kapasitas koordinasi, dan peran pemerintah kota sebagai penghubung kebijakan lintas tingkat pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: *Blue Economy*; Tata Kelola Pesisir; Fragmentasi Kewenangan; Nelayan; Singkawang

Jenis Penelitian: *Case Study* (Studi Kasus)

PENDAHULUAN

Blue economy menjadi salah satu pendekatan penting dalam pembangunan wilayah pesisir karena berupaya menghubungkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan sumber daya laut dan pesisir bukan hanya sebagai ruang produksi ekonomi, tetapi juga sebagai ekosistem yang perlu dijaga agar dapat mendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan *blue economy* perlu disusun secara kontekstual, koheren, dan sesuai dengan kondisi sosial-ekologis wilayah pesisir (Voyer et al., 2021). Dalam kerangka tersebut, masyarakat pesisir perlu ditempatkan sebagai aktor utama, bukan hanya sebagai penerima manfaat dari kebijakan pembangunan kelautan (Evans et al., 2023).

Implementasi *blue economy* dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola. Wilayah pesisir merupakan ruang yang melibatkan banyak sektor, seperti perikanan, lingkungan hidup, perdagangan, pariwisata, konservasi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan banyak sektor tersebut membuat pengelolaan pesisir membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan lintas tingkat pemerintahan. Kebijakan *blue economy* sering berada dalam jaringan kelembagaan dan regulasi yang kompleks, sehingga hubungan antarlembaga perlu dipahami sebagai bagian penting dari proses implementasi (Frohlich et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, penguatan tata kelola sumber daya maritim juga membutuhkan harmonisasi kerangka hukum agar pemanfaatan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan secara seimbang (Sutisna et al., 2025).

Tantangan tata kelola tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah pesisir yang luas dan beragam. Pengelolaan pesisir dan perikanan melibatkan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian kewenangan tersebut penting untuk memperjelas peran setiap level pemerintahan. Namun, dalam praktik di tingkat lokal, pembagian kewenangan seringkali berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat langsung dan sehari-hari. Pemerintah kabupaten/kota merupakan aktor yang paling dekat dengan masyarakat pesisir, termasuk nelayan kecil, pengolah hasil laut, dan pelaku ekonomi lokal. Sementara itu, sebagian kewenangan pengelolaan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* membutuhkan tata kelola yang mampu menjembatani kewenangan formal dan kebutuhan faktual masyarakat di tingkat lokal.

Blue economy juga berhubungan erat dengan keberlanjutan penghidupan nelayan kecil. Nelayan kecil tidak hanya menghadapi persoalan produksi dan akses terhadap sumber daya laut, tetapi juga tantangan administratif, akses pasar, infrastruktur, serta perubahan kondisi lingkungan pesisir. Penguatan tata kelola

perikanan skala kecil perlu memperhatikan hak akses nelayan dan sistem pengelolaan yang dekat dengan masyarakat (Halim et al., 2020). Agenda *blue economy* juga perlu memperhatikan penghidupan nelayan agar kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung kelompok masyarakat yang bergantung langsung pada sumber daya pesisir (Wasik et al., 2024).

Aspek lingkungan juga menjadi bagian penting dari tata kelola *blue economy*. Salah satu isu yang relevan adalah konservasi ekosistem pesisir, termasuk mangrove. Mangrove memiliki fungsi ekologis dalam melindungi wilayah pantai, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendukung keseimbangan ekosistem pesisir. Selain itu, mangrove juga memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Restorasi mangrove berbasis komunitas dapat menjadi pendekatan penting karena menggabungkan tujuan ekologis dengan keterlibatan masyarakat (Kusumadewi et al., 2024). Dalam perkembangan terbaru, pendekatan *Other Effective Area-Based Conservation Measures* atau OECD juga mulai mendapat perhatian sebagai alternatif pengelolaan konservasi di luar kawasan konservasi formal. OECD dan kawasan konservasi laut berpotensi memperkuat kontribusi konservasi laut di Indonesia (Estradivari et al., 2024).

Isu lain yang semakin penting dalam *blue economy* adalah pengelolaan sampah laut dan ekonomi sirkular. Sampah laut tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan perilaku masyarakat, kapasitas kelembagaan, sistem pengumpulan sampah, dan peluang ekonomi dari kegiatan pemilahan serta daur ulang. Pengelolaan sampah plastik berbasis ekonomi sirkular membutuhkan penguatan kemitraan antar pemangku kepentingan (Prabawati et al., 2023). Ekonomi sirkular juga dapat ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan masyarakat pesisir dalam perspektif *blue economy* (Wahyuni et al., 2026).

Kota Singkawang merupakan salah satu kota pesisir di Kalimantan Barat yang memiliki dinamika penting dalam pengelolaan pesisir dan perikanan. Wilayah pesisir Singkawang memiliki aktivitas nelayan, perdagangan ikan, pengolahan hasil laut, kawasan mangrove, serta program pengelolaan sampah laut. Data lapangan menunjukkan bahwa isu pesisir di Singkawang tidak hanya berkaitan dengan produksi perikanan, tetapi juga dengan fluktuasi harga ikan akibat cuaca, penurunan hasil tangkapan, persaingan antara pedagang resmi dan pedagang tanpa izin, serta keberadaan sampah plastik di laut. Wawancara dengan nelayan dan pedagang ikan menunjukkan bahwa perubahan cuaca, gelombang tinggi, dan ketidakpastian hasil tangkapan memengaruhi stabilitas ekonomi pelaku perikanan lokal. Di sisi lain, wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menunjukkan bahwa pengelolaan pesisir juga berkaitan dengan persoalan sampah kota, intrusi air laut,

adaptasi lingkungan, serta keterbatasan kewenangan pemerintah kota atas wilayah laut.

Dalam konteks Singkawang, salah satu isu penting adalah posisi pemerintah kota dalam pengelolaan pesisir dan perikanan. Meskipun kewenangan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kota tetap menjadi aktor yang dekat dengan nelayan di wilayah pesisir. Peran tersebut terlihat dalam pembinaan, fasilitas administrasi, rekomendasi BBM, pendampingan pengolahan hasil laut, serta penanganan isu lingkungan pesisir. Selain itu, pengelolaan pesisir juga melibatkan dinas lingkungan hidup dalam isu sampah laut, dinas perdagangan dan perindustrian dalam pengolahan serta pemasaran hasil perikanan, dan organisasi nelayan dalam mendampingi kebutuhan nelayan. Relasi antar lembaga tersebut menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* di Singkawang berlangsung melalui tata kelola lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Kajian mengenai *blue economy* telah banyak membahas potensi ekonomi kelautan, konservasi, perikanan berkelanjutan, dan ekonomi sirkular. Pengembangan *blue economy* juga dipahami sebagai agenda yang perlu disusun secara kontekstual dengan menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor penting dalam pembangunan kelautan (Evans et al., 2023; Voyer et al., 2021). Dalam praktiknya, implementasi *blue economy* sering berlangsung dalam jaringan kelembagaan yang kompleks sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor dan harmonisasi tata kelola sumber daya maritim (Frohlich et al., 2023; Sutisna et al., 2025). Meski demikian, masih diperlukan kajian yang lebih spesifik mengenai bagaimana *blue economy* dijalankan dalam konteks tata kelola lokal, terutama pada kota pesisir non-metropolitan. Dalam konteks seperti Singkawang, persoalan utama tidak hanya terletak pada potensi sumber daya pesisir, tetapi juga pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana koordinasi dibangun, bagaimana nelayan dan pelaku ekonomi lokal didampingi, serta bagaimana isu lingkungan hidup seperti sampah laut dan mangrove dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan tata kelola menjadi penting untuk melihat hubungan antara kebijakan, kelembagaan, aktor lokal, dan penghidupan nelayan.

Penelitian mengenai *blue economy* dalam lima tahun terakhir menunjukkan pergeseran fokus dari pendekatan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya laut menuju tata kelola yang lebih terintegrasi. Berbagai studi menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *blue economy* sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kajian sistematis menemukan bahwa implementasi *Integrated Coastal and Marine Management* (ICM) memerlukan kepemimpinan kelembagaan, jejaring antaraktor, serta mekanisme koordinasi yang kuat sebagai prasyarat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir (Eger et al., 2021). Implementasi *Marine Spatial Planning* (MSP) di berbagai

negara masih menghadapi ambiguitas kelembagaan akibat tidak jelasnya pembagian otoritas dan lemahnya koordinasi antar instansi, sehingga diperlukan model kewenangan yang lebih adaptif (Albotoush & Shau-Hwai, 2021). Pada tingkat kebijakan, ditunjukkan bahwa tata kelola *blue economy* menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, perbedaan mandat antarpemerintah, dan lemahnya koordinasi vertikal maupun horizontal, khususnya antara pemerintah nasional dan pemerintah subnasional (OECD, 2024). Penelitian di Panama menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan *blue economy* sangat bergantung pada koherensi kebijakan (*policy coherence*) antar sektor dan antar tingkat pemerintahan (de Ycaza et al., 2024). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi tata kelola semakin dipandang sebagai faktor kunci dalam mewujudkan *blue economy* yang berkelanjutan.

Penelitian terdahulu masih menyisakan beberapa kesenjangan. Pertama, sebagian besar penelitian menganalisis tata kelola *blue economy* pada tingkat nasional, lintas negara, atau dalam konteks *marine spatial planning* dan *integrated coastal management*, sehingga belum banyak mengkaji bagaimana fragmentasi kewenangan memengaruhi implementasi *blue economy* pada tingkat pemerintah daerah. Kedua, penelitian yang ada lebih banyak menitikberatkan pada koordinasi kelembagaan atau koherensi kebijakan, namun belum secara khusus menjelaskan bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota memengaruhi pelayanan kepada nelayan serta pengelolaan ekonomi pesisir. Ketiga, konteks kota pesisir non metropolitan di negara berkembang masih relatif kurang dieksplorasi dibandingkan kawasan pesisir berskala nasional atau internasional. Akibatnya, masih terbatas bukti empiris mengenai bagaimana pemerintah kota tetap menjalankan fungsi fasilitatif meskipun kewenangan pengelolaan ruang laut berada pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis fragmentasi kewenangan dalam tata kelola *blue economy* di pesisir Kota Singkawang melalui perspektif tata kelola multilevel (*multi-level governance*), sehingga dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara distribusi kewenangan, koordinasi antar lembaga, dan implementasi *blue economy* pada tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena tata kelola *blue economy* dalam konteks spesifik wilayah pesisir Kota Singkawang. Studi kasus relevan digunakan ketika penelitian berfokus pada pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, serta ketika peneliti ingin memahami fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin et al., 2018). Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan untuk menjelaskan bagaimana fragmentasi

kewenangan, koordinasi antarlembaga, dan kebutuhan masyarakat pesisir memengaruhi implementasi *blue economy* di tingkat lokal.

Penelitian dilakukan di wilayah pesisir Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota Singkawang dipilih secara purposif karena merepresentasikan kota pesisir nonmetropolitan yang memperlihatkan keterkaitan antara penghidupan nelayan, perdagangan ikan, pengolahan hasil laut, pengelolaan sampah laut, potensi mangrove, dan tata kelola pesisir yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan. Lokasi penelitian mencakup kawasan pesisir, pasar ikan, wilayah pengolahan hasil laut, kawasan mangrove, serta instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir, perikanan, perdagangan, lingkungan hidup, dan tata kelola sumber daya pesisir.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada Mei–Juli 2025 untuk memperoleh observasi awal dan wawancara dengan masyarakat pesisir, nelayan, pedagang ikan, serta pemangku kepentingan pemerintah daerah. Tahap kedua dilakukan pada Juni 2026 untuk memperdalam dan memverifikasi temuan awal melalui observasi lanjutan dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 14 orang, yang terdiri atas tiga nelayan, empat pedagang ikan, dan tujuh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah, organisasi nelayan, dan pengelola pasar.

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam aktivitas pesisir, perikanan, perdagangan ikan, pengolahan hasil laut, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola pesisir di Kota Singkawang. Informan nelayan dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam aktivitas penangkapan ikan dan memahami perubahan kondisi pesisir. Informan pedagang ikan dipilih karena memahami dinamika pasokan, harga, distribusi, dan perdagangan hasil laut. Sementara itu, informan pemangku kepentingan dipilih karena memiliki tugas, kewenangan, atau keterlibatan dalam pengelolaan pesisir, perikanan, perdagangan, lingkungan hidup, organisasi nelayan, dan pengelolaan pasar.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan di Pasar Ikan Bersih, Pasar Ikan Alianyang, kawasan pesisir, dan instansi pemerintah terkait. Pedoman wawancara mencakup tema pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, pelayanan kepada nelayan, rekomendasi BBM, dinamika pasar ikan, pengolahan hasil laut, pengelolaan sampah laut, potensi mangrove, serta implementasi *blue economy* di tingkat lokal. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami secara langsung aktivitas pesisir, dinamika pasar ikan, pengolahan hasil laut, kondisi lingkungan pesisir, dan praktik tata kelola yang berlangsung di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen kebijakan, laporan penelitian, artikel ilmiah, serta data administratif Dinas

Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Data administratif tersebut mencakup neraca pengelolaan sampah dan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir pada 2023–2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan lapangan memperlihatkan sebuah pola yang menarik: meskipun pemerintah kota tidak memegang kewenangan formal atas wilayah laut, nelayan dan pelaku ekonomi pesisir justru paling sering berhubungan dengan perangkat pemerintah kota ketika menghadapi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut mencakup pengurusan dokumen dan rekomendasi BBM, persoalan pasar ikan, pengolahan hasil laut, sampah pesisir, hingga perlindungan mangrove. Dengan demikian, implementasi *blue economy* di Singkawang tidak berjalan melalui satu lembaga atau satu tingkat pemerintahan, tetapi melalui hubungan kerja yang tersebar, saling bergantung, dan belum selalu terhubung secara konsisten. Bagian berikut menguraikan pola tersebut melalui empat temuan utama: dinamika kewenangan, pendampingan nelayan, koordinasi lingkungan pesisir, serta penghidupan dan konservasi.

Dinamika Kewenangan dalam Tata Kelola Pesisir dan Perikanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* di Kota Singkawang berlangsung dalam konteks tata kelola yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan sektor kebijakan. Pengelolaan pesisir tidak hanya berhubungan dengan aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga dengan pengelolaan lingkungan hidup, perdagangan hasil laut, pengolahan produk perikanan, konservasi mangrove, dan penanganan sampah laut. Pelaksanaan *blue economy* membutuhkan koordinasi yang mampu menghubungkan peran pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, organisasi nelayan, pelaku pasar, dan masyarakat pesisir.

Dalam konteks Singkawang, kewenangan pengelolaan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah kota tidak lagi memiliki kewenangan langsung atas wilayah laut, tetapi tetap menjadi aktor yang paling dekat dengan nelayan dan masyarakat pesisir. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara kewenangan formal dan kebutuhan faktual di lapangan. Secara formal, pengelolaan laut berada pada tingkat pemerintahan di atas kota, sementara dalam praktik sehari-hari nelayan tetap lebih mudah mengakses pemerintah kota karena kedekatan wilayah dan pelayanan. Pembagian peran aktor dalam tata kelola pesisir dan perikanan di Singkawang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembagian Peran Aktor dalam Tata Kelola Pesisir dan Perikanan di Kota Singkawang

Aktor	Peran dalam Tata Kelola Pesisir	Isu yang Berkaitan
Pemerintah Pusat	Menetapkan kebijakan nasional kelautan, regulasi perizinan tertentu, pengawasan, dan arah pembangunan kelautan	Standar kebijakan, pengawasan laut, konservasi, dan program nasional
Pemerintah Provinsi	Memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut 0–12 mil dan perikanan lintas daerah	Perizinan, pengawasan, koordinasi wilayah laut, dan pengelolaan sumber daya pesisir
Pemerintah Kota	Melakukan pembinaan, fasilitasi administrasi, rekomendasi BBM, serta pendampingan nelayan dan pengolahan hasil laut	Pelayanan lokal, pendampingan nelayan, koordinasi, dan penguatan ekonomi pesisir
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Mendukung pelatihan, pendampingan, dan pengembangan produk olahan hasil laut	Hilirisasi, pemasaran, produk olahan, kemasan, dan izin edar
HNSI/Kelompok Nelayan	Membantu komunikasi, pendampingan kebutuhan nelayan, dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah	Perizinan, BBM, perlindungan nelayan, dan akses program pemerintah
Nelayan dan Pelaku Pasar Ikan	Menjalankan aktivitas penangkapan, distribusi, dan perdagangan hasil laut	Penghidupan pesisir, fluktuasi harga, hasil tangkapan, dan stabilitas pasar ikan

Sumber: Diolah oleh penulis dari data lapangan, 2026.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pembagian peran tidak membentuk hubungan yang sepenuhnya terpisah. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memegang fungsi

regulasi, pengawasan, serta kewenangan pengelolaan ruang laut, sedangkan pemerintah kota menangani kebutuhan yang lebih dekat dengan kehidupan nelayan dan pelaku usaha pesisir. Dinas perdagangan dan organisasi nelayan memperluas hubungan tersebut melalui dukungan hilirisasi, pemasaran, komunikasi, dan pendampingan. Sementara itu, nelayan dan pelaku pasar menjadi pihak yang langsung merasakan dampak dari kebijakan, perubahan lingkungan, dan dinamika pasar. Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, tetapi juga pada kemampuan setiap aktor untuk menghubungkan mandat formal dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dinamika tersebut terlihat dalam beberapa bentuk peran pemerintah kota, seperti pembinaan kelompok nelayan, fasilitas administrasi, rekomendasi BBM, pendampingan pengolahan hasil laut, dan penanganan isu lingkungan pesisir. Pemerintah kota juga berperan sebagai penghubung antara kebutuhan nelayan dan kebijakan yang berada pada tingkat provinsi atau pusat. Peran pemerintah kota tidak dapat dipahami hanya melalui batas kewenangan formal, tetapi juga melalui fungsi pelayanan, pendampingan, dan koordinasi yang tetap berlangsung di tingkat lokal.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa implementasi *blue economy* sering berlangsung dalam jaringan kelembagaan yang kompleks dan membutuhkan harmonisasi tata kelola lintas sektor serta lintas tingkat pemerintahan (Frohlich et al., 2023; Sutisna et al., 2025). Dalam kasus Singkawang, kebutuhan harmonisasi tersebut tampak pada hubungan antara kewenangan pengelolaan laut yang berada pada pemerintah provinsi dan pusat dengan kebutuhan pelayanan nelayan yang tetap hadir di tingkat kota. Tantangan utama bukan hanya pada pembagian kewenangan, tetapi juga pada bagaimana kewenangan tersebut dapat dikoordinasikan agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir.

Pendampingan Nelayan dan Tantangan Administratif

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kesulitan nelayan tidak selalu muncul saat berada di laut. Sejumlah hambatan justru terjadi ketika mereka harus memasuki sistem pelayanan pemerintah yang mensyaratkan dokumen, data kapal, akun digital, dan koordinasi dengan lebih dari satu instansi. Bagi nelayan kecil, persyaratan tersebut dapat menentukan akses terhadap BBM bersubsidi, bantuan, dan legalitas usaha. Temuan ini menjadikan administrasi bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian penting dari keberlanjutan kehidupan nelayan.

Nelayan di wilayah pesisir Singkawang menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas melaut, tetapi juga dengan kebutuhan administratif. Proses pengurusan dokumen, perizinan, rekomendasi BBM, dan penyesuaian terhadap sistem administrasi digital menjadi bagian dari realitas yang dihadapi

nelayan skala kecil. Persyaratan tersebut penting untuk mendukung legalitas usaha dan akses terhadap program pemerintah, tetapi dalam praktiknya tidak semua nelayan memiliki pengetahuan, perangkat, atau kemampuan teknis yang memadai untuk mengikuti prosedur administratif secara mandiri.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan administratif menjadi bagian penting dalam tata kelola *blue economy*. Pemerintah kota tetap memiliki peran dalam membantu nelayan memahami prosedur administrasi, menyiapkan dokumen, serta menghubungkan mereka dengan layanan yang tersedia. Peran ini menjadi penting karena akses terhadap dokumen tertentu dapat memengaruhi kemampuan nelayan untuk memperoleh rekomendasi BBM, bantuan pemerintah, maupun legalitas dalam kegiatan penangkapan ikan. Dalam konteks Singkawang, pendampingan administratif juga menunjukkan bahwa pemerintah kota tetap berperan dekat dengan nelayan, meskipun kewenangan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Organisasi nelayan juga memiliki peran dalam menjembatani kebutuhan nelayan dengan pemerintah. Keberadaan organisasi seperti HNSI atau kelompok nelayan dapat membantu komunikasi, penyampaian aspirasi, dan pendampingan dalam proses pengurusan kebutuhan administratif. Peran tersebut penting terutama ketika nelayan menghadapi prosedur yang membutuhkan komunikasi lintas lembaga atau pengurusan di luar kota. Bentuk tantangan administratif dan arah pendampingan nelayan di Singkawang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tantangan Administratif dan Arah Pendampingan Nelayan di Singkawang

Aspek Administratif	Tantangan yang Dihadapi Nelayan	Arah Pendampingan yang Diperlukan
Dokumen nelayan dan kapal	Nelayan perlu menyiapkan dokumen identitas, data kapal, dan kelengkapan usaha penangkapan	Pendampingan pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, dan penjelasan prosedur
Perizinan usaha penangkapan	Proses perizinan membutuhkan pemahaman terhadap prosedur dan lembaga yang berwenang	Fasilitasi informasi dan penghubung antara nelayan dengan instansi terkait
Rekomendasi BBM	Akses terhadap BBM bersubsidi membutuhkan kelengkapan administrasi tertentu	Pendampingan penyusunan syarat administrasi dan verifikasi kebutuhan nelayan
Sistem administrasi digital	Tidak semua nelayan memiliki perangkat, akses internet, atau	Bantuan teknis dalam penggunaan sistem digital,

	kemampuan menggunakan aplikasi digital	pembuatan akun, dan pengisian data
Koordinasi lintas lembaga	Beberapa kebutuhan nelayan melibatkan pemerintah kota, provinsi, pusat, dan organisasi nelayan	Penguatan komunikasi antarinstansi agar pelayanan lebih mudah dipahami
Peran organisasi nelayan	Nelayan membutuhkan perantara yang memahami kondisi lapangan dan prosedur pemerintahan	Penguatan peran HNSI atau kelompok nelayan sebagai penghubung dan pendamping
Kesesuaian kebijakan dengan kondisi lokal	Sebagian kebijakan administratif dan perizinan belum sepenuhnya mudah diterapkan oleh nelayan kecil karena perbedaan kapasitas, akses layanan, dan karakteristik usaha penangkapan	Penyesuaian mekanisme implementasi kebijakan agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal, tanpa mengurangi tujuan legalitas dan ketertiban pengelolaan perikanan

Sumber: Diolah oleh penulis dari data lapangan, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa persoalan administratif tidak dapat dipahami sebagai masalah teknis semata. Administrasi menjadi pintu masuk bagi nelayan untuk memperoleh akses terhadap layanan, perlindungan, bantuan, dan kepastian usaha. Ketika prosedur administrasi tidak mudah dijangkau, nelayan kecil berpotensi mengalami kesulitan dalam memanfaatkan program pemerintah yang sebenarnya ditujukan untuk mendukung penghidupan mereka. Pendampingan administratif perlu diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang mendukung keberlanjutan ekonomi pesisir.

Tabel 2 di atas juga memperlihatkan bahwa tantangan administratif tidak hanya muncul dari kemampuan individu nelayan, tetapi juga dari kesesuaian antara desain kebijakan dan kondisi pelaksanaan di tingkat lokal. Kebijakan yang baik tetap memerlukan mekanisme implementasi yang mudah dipahami, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kapasitas nelayan kecil. Temuan ini sejalan dengan kajian tentang tata kelola perikanan skala kecil yang menekankan pentingnya akses nelayan, dukungan kelembagaan, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir (Halim et al., 2020; Wasik et al., 2024). Dalam kerangka *blue economy*, penguatan nelayan skala kecil tidak cukup dilakukan melalui peningkatan produksi atau konservasi sumber daya, tetapi juga melalui dukungan administratif yang memudahkan mereka masuk ke dalam sistem pelayanan dan kebijakan. Pendampingan yang jelas, mudah diakses, dan terkoordinasi dapat membantu nelayan memenuhi persyaratan administrasi tanpa mengurangi perhatian mereka terhadap aktivitas utama sebagai pelaku perikanan.

Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Sampah Laut dan Lingkungan Pesisir

Pengelolaan lingkungan pesisir di Singkawang menjadi bagian penting dari implementasi *blue economy*. Isu pesisir tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perikanan, tetapi juga dengan pengelolaan sampah, intrusi air laut, adaptasi lingkungan, serta keterbatasan kewenangan pemerintah kota atas wilayah laut. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sampah yang ditemukan nelayan dan masyarakat di kawasan pesisir tidak dapat dipisahkan dari sistem persampahan kota. Karena itu, pembahasan sampah laut perlu ditempatkan dalam hubungan antara sumber sampah di daratan, kapasitas pengangkutan, pengolahan, dan koordinasi lintas sektor.

Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA mengalami peningkatan selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, volume sampah tercatat sebesar 27.012,3 ton per tahun atau rata-rata 74,0 ton per hari. Jumlah tersebut meningkat menjadi 31.263,3 ton per tahun atau 85,4 ton per hari pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 33.521,1 ton per tahun atau 91,8 ton per hari pada tahun 2025. Dengan demikian, volume sampah yang masuk ke TPA meningkat sekitar 24,10 persen selama periode tersebut. Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya beban yang harus ditangani oleh sistem pengelolaan sampah perkotaan. Dalam konteks wilayah pesisir, peningkatan volume sampah juga perlu mendapat perhatian karena sampah yang tidak tertangani secara optimal berpotensi terbawa melalui aliran sungai menuju muara, pantai, dan laut. Oleh karena itu, penguatan pemilahan dari sumber, pengangkutan, pengolahan, dan koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk mengurangi risiko kebocoran sampah ke lingkungan pesisir. Perkembangan volume sampah yang masuk ke TPA Kota Singkawang selama periode 2023–2025 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Volume Sampah yang Masuk ke TPA Kota Singkawang Tahun 2023–2025

Tahun	Timbulan (ton/tahun)	Rata-rata (ton/hari)
2023	27.012,3 ton/tahun	74,0 ton/hari
2024	31.263,3 ton/tahun	85,4 ton/hari
2025	33.521,1 ton/tahun	91,8 ton/hari

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Neraca Pengelolaan Sampah 2021–2025 (data administratif diterima oleh penulis pada 2026).

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3, peningkatan volume sampah terjadi secara konsisten setiap tahun. Kenaikan terbesar terjadi antara tahun 2023 dan 2024, yaitu sekitar 15,74 persen, sedangkan pada periode 2024–2025 terjadi kenaikan sekitar 7,22 persen. Pola ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah Kota Singkawang

menghadapi beban yang semakin besar, sehingga pengurangan sampah dari sumber dan pencegahan kebocoran sampah ke wilayah pesisir perlu diperkuat. Sampah yang berasal dari daratan dapat masuk ke wilayah pesisir dan laut apabila tata kelola sampah belum berjalan secara optimal. Pengelolaan sampah laut dalam kerangka *blue economy* membutuhkan kerja sama antara pemerintah kota, masyarakat, bank sampah, kelompok nelayan, dan aktor lain yang memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan. Gambaran isu lingkungan pesisir dan arah penguatan tata kelolanya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Isu Lingkungan Pesisir dan Arah Penguatan Tata Kelola di Singkawang

Isu Lingkungan Pesisir	Temuan Lapangan	Arah Penguatan Tata Kelola
Sampah kota	Volume sampah yang masuk ke TPA meningkat dari 27.012,3 ton pada tahun 2023 menjadi 33.521,1 ton pada tahun 2025, atau dari rata-rata sekitar 74,0 ton menjadi 91,8 ton per hari. Selama periode tersebut, volume sampah yang masuk ke TPA meningkat sekitar 24,10 persen.	Penguatan pengurangan sampah dari sumber melalui prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R), peningkatan pemilahan, serta penyesuaian kapasitas layanan terhadap pertumbuhan timbulan sampah.
Sampah laut	Sebagian sampah yang tidak tertangani berpotensi masuk ke sungai, pesisir, dan laut	Pelibatan masyarakat, nelayan, dan bank sampah dalam pengumpulan serta pemilahan sampah
Ekonomi sirkular	Sampah yang terpilah dapat memiliki nilai ekonomi jika terserap oleh sistem pengelolaan yang jelas	Penguatan bank sampah, kemitraan, dan mekanisme penyerapan hasil pilahan sampah
Intrusi air laut	Wilayah tertentu menghadapi persoalan air tanah yang tercemar intrusi air laut	Pengembangan strategi adaptasi lingkungan, seperti sumur resapan dan kolam retensi
Kewenangan wilayah laut	Pemerintah kota memiliki keterbatasan kewenangan langsung atas wilayah laut	Koordinasi lintas tingkat pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan pesisir serta penambahan menara atau penanda batas wilayah oleh

pemerintah Provinsi agar memudahkan nelayan mengetahui batas wilayah tangkap

Keterlibatan nelayan	Nelayan terdampak oleh sampah laut, tetapi juga dapat dilibatkan dalam pengumpulan sampah laut	Penguatan program lingkungan berbasis partisipasi nelayan dan masyarakat pesisir
----------------------	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis dari data lapangan, 2026.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut berhubungan dengan tata kelola lingkungan yang lebih luas. Persoalan sampah tidak berhenti pada proses pembuangan, tetapi juga berkaitan dengan pemilahan dari sumber, keterlibatan masyarakat, kapasitas pengolahan, dan keberlanjutan lembaga pengelola. Dalam konteks Singkawang, pengelolaan sampah laut juga memiliki hubungan dengan kualitas lingkungan pesisir, aktivitas nelayan, pasar hasil laut, dan kawasan mangrove. Kualitas lingkungan yang menurun dapat berdampak pada aktivitas perikanan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Program pengelolaan sampah laut yang melibatkan nelayan memperlihatkan adanya peluang untuk menghubungkan agenda lingkungan dengan kehidupan masyarakat. Nelayan tidak hanya menjadi kelompok yang terdampak oleh pencemaran laut, tetapi juga dapat dilibatkan sebagai aktor dalam pengumpulan dan pemilahan sampah laut. Sampah yang terkumpul dapat dipilah dan memiliki nilai ekonomi jika didukung oleh mekanisme penyerapan yang jelas. Pendekatan seperti ini dapat memperkuat ekonomi sirkular karena menghubungkan pengurangan sampah dengan manfaat ekonomi lokal.

Pengelolaan sampah laut dalam kerangka *blue economy* membutuhkan kemitraan antar pemangku kepentingan dan pendekatan ekonomi sirkular agar persoalan lingkungan dapat sekaligus dikaitkan dengan manfaat ekonomi masyarakat pesisir (Prabawati et al., 2023; Wahyuni et al., 2026). Dalam konteks Singkawang, penguatan ekonomi sirkular perlu didukung oleh kelembagaan yang konsisten, pembiayaan yang memadai, serta kerja sama antara pemerintah, bank sampah, kelompok nelayan, dan masyarakat. Keberlanjutan program tidak hanya ditentukan oleh kegiatan pengumpulan sampah, tetapi juga oleh kepastian pemilahan, pembelian, pengolahan, dan penggunaan kembali material yang masih bernilai.

Pengelolaan lingkungan pesisir juga terkait dengan adaptasi terhadap intrusi air laut dan keterbatasan kewenangan pemerintah kota atas wilayah laut. Wawancara dengan DLH Kota Singkawang menunjukkan bahwa persoalan intrusi air laut dan kebutuhan infrastruktur adaptasi, seperti sumur resapan dan kolam retensi, menjadi bagian dari perhatian pengelolaan lingkungan kota pesisir. Keterbatasan kewenangan

pemerintah kota atas wilayah laut membuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait menjadi semakin penting.

Penghidupan Pesisir, Tata Kelola Pasar Ikan, dan Konservasi Mangrove

Pasar ikan dan kawasan mangrove memperlihatkan dua sisi *blue economy* yang sering dibahas secara terpisah. Di pasar, keberlanjutan terlihat melalui kestabilan pasokan, harga, distribusi, dan perlindungan pelaku usaha kecil. Di kawasan pesisir, keberlanjutan bergantung pada kondisi ekosistem yang menopang aktivitas ekonomi tersebut. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perubahan cuaca, hasil tangkapan, persaingan dagang, sampah plastik, dan kondisi mangrove berhubungan langsung dengan penghidupan masyarakat pesisir.

Pasar ikan menjadi ruang penting untuk memahami hubungan antara hasil tangkapan, harga, cuaca, dan penghidupan masyarakat pesisir. Wawancara dengan pedagang ikan di Pasar Ikan Bersih Condong dan Pasar Ali yang menunjukkan bahwa harga ikan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan ketersediaan pasokan. Ketika ombak tinggi atau cuaca buruk, hasil tangkapan nelayan menurun dan harga ikan dapat meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di pasar ikan memiliki hubungan erat dengan kondisi ekologis di laut.



Gambar 1. Aktivitas perdagangan hasil laut di lokasi penelitian, Kota Singkawang.

Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.

Dinamika pasar ikan juga menunjukkan adanya persoalan tata kelola dalam rantai distribusi hasil laut. Pedagang resmi menghadapi persaingan dengan pedagang tanpa izin yang berjualan di luar area pasar. Pedagang resmi memiliki kewajiban membayar retribusi dan mengikuti aturan pasar, sedangkan pedagang tanpa izin tidak selalu berada dalam sistem pengaturan yang sama. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan ekonomi pesisir tidak hanya ditentukan oleh

aktivitas penangkapan ikan di laut, tetapi juga oleh tata kelola pasar, distribusi, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.

Dari sisi nelayan, tantangan yang muncul berkaitan dengan cuaca tidak menentu, gelombang tinggi, berkurangnya hasil tangkapan, dan keberadaan sampah plastik di laut. Beberapa nelayan juga menyampaikan kekhawatiran terhadap praktik penangkapan yang merugikan nelayan lokal. Di tengah tantangan tersebut, terdapat bentuk adaptasi sederhana, seperti penggunaan panel surya pada kapal nelayan untuk mendukung aktivitas melaut. Temuan ini menunjukkan bahwa nelayan tidak hanya berhadapan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga dengan perubahan lingkungan, tata kelola sumber daya, dan kebutuhan adaptasi teknologi. Dinamika penghidupan nelayan, pasar ikan, dan lingkungan pesisir dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Dinamika Penghidupan Nelayan, Pasar Ikan, dan Lingkungan Pesisir di Singkawang

Aspek	Temuan Lapangan	Implikasi bagi Tata Kelola <i>Blue Economy</i>
Harga ikan	Harga ikan dipengaruhi oleh cuaca, ombak, dan ketersediaan pasokan	Stabilitas pasar ikan perlu diperhatikan sebagai bagian dari ekonomi pesisir serta perlu adanya bantuan <i>cold storage</i> bagi nelayan, agar ketika hasil tangkapan melimpah nelayan dapat menyimpan dalam <i>cold storage</i> tersebut.
Pedagang resmi	Pedagang resmi membayar retribusi dan mengikuti aturan pasar	Tata kelola pasar perlu menjaga keadilan bagi pelaku usaha yang berada dalam sistem resmi
Pedagang tanpa izin	Sebagian pedagang berjualan di luar area pasar dan tidak berada dalam pengaturan yang sama	Penataan pasar perlu dilakukan secara inklusif agar tidak menimbulkan konflik ekonomi lokal
Nelayan	Nelayan menghadapi cuaca tidak menentu, gelombang tinggi, dan hasil tangkapan yang menurun	Dukungan terhadap adaptasi nelayan perlu diperkuat
Sampah plastik di laut	Nelayan menemukan sampah plastik saat melaut	Pengelolaan sampah laut perlu dihubungkan dengan aktivitas nelayan dan masyarakat pesisir
Adaptasi teknologi	Sebagian kapal nelayan mulai menggunakan panel surya	Teknologi sederhana dapat mendukung efisiensi dan adaptasi nelayan

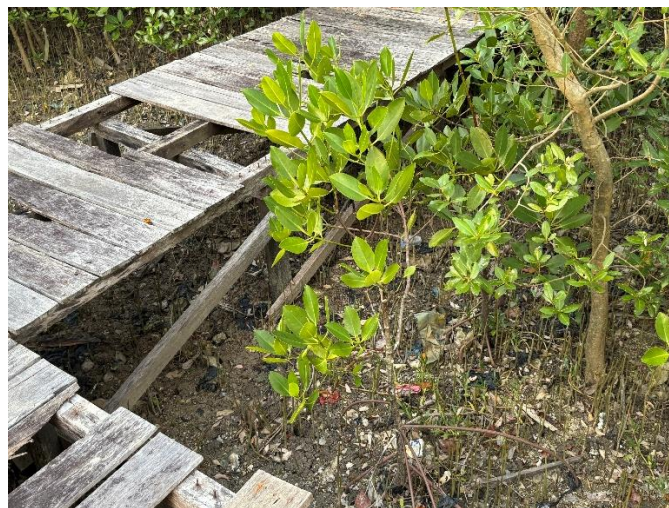
Sumber: Diolah oleh penulis dari data lapangan, 2026.

Tabel 5 menunjukkan bahwa *blue economy* perlu dilihat sampai pada rantai nilai dan penghidupan pelaku ekonomi lokal, bukan hanya pada sektor produksi di

laut. Wawancara dengan nelayan dan pedagang ikan memperlihatkan bahwa cuaca, fluktuasi harga, hasil tangkapan, persaingan pasar, dan persoalan lingkungan memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat pesisir. Kebijakan *blue economy* perlu memperhatikan tata kelola pasar, perlindungan pelaku usaha kecil, dan dukungan terhadap adaptasi nelayan dalam menghadapi perubahan kondisi pesisir. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat pesisir perlu ditempatkan sebagai bagian utama dalam pembangunan *blue economy*, terutama karena mereka berhadapan langsung dengan risiko ekonomi dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari (Evans et al., 2023; Wasik et al., 2024).

Penghidupan pesisir juga tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks Singkawang, mangrove menjadi salah satu ekosistem penting yang dapat mendukung perlindungan pesisir, habitat biota, edukasi lingkungan, dan peluang ekonomi berbasis komunitas. Kota Singkawang belum memiliki Kawasan Konservasi Perairan Daerah atau KKPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen konservasi formal belum menjadi pilihan utama dalam pengelolaan pesisir Singkawang. Pengelolaan berbasis konservasi tetap memiliki ruang, terutama melalui potensi mangrove di wilayah Singkawang Utara.

Mangrove dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi *blue economy* karena menghubungkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Ekosistem ini berperan dalam menjaga keseimbangan pesisir, mengurangi risiko abrasi, menyediakan habitat bagi biota, serta mendukung aktivitas edukasi dan ekonomi masyarakat. Potensi mangrove di Singkawang Utara dapat dikembangkan melalui pendekatan berbasis komunitas agar konservasi tidak hanya dipahami sebagai perlindungan alam, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan penghidupan masyarakat pesisir.



Gambar 2. Mangrove di wilayah pesisir Singkawang.
Sumber: Dokumentasi penulis, 2025.

Literatur menunjukkan bahwa restorasi mangrove berbasis komunitas dan pendekatan Other Effective Area-Based Conservation Measures atau OECM dapat menjadi alternatif penting dalam memperkuat konservasi di luar kawasan konservasi formal (Dudayev et al., 2025; Estradivari et al., 2024; Kusumadewi et al., 2024). Dalam kasus Singkawang, pendekatan tersebut relevan karena pengelolaan pesisir tidak selalu harus dimulai dari penetapan kawasan konservasi formal. Praktik pengelolaan lokal yang mendukung keberlanjutan ekosistem, keterlibatan masyarakat, dan manfaat sosial-ekonomi dapat menjadi dasar awal untuk memperkuat konservasi berbasis area.

Pengembangan pendekatan OECM tetap membutuhkan data ekologis, kelembagaan lokal yang kuat, dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Peluang OECM di Singkawang tidak dapat dipahami sebagai pengganti KKPD, tetapi sebagai salah satu alternatif pengelolaan yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik lokal. Pendekatan ini penting agar konservasi pesisir dapat berjalan selaras dengan kebutuhan penghidupan masyarakat dan arah pembangunan *blue economy*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* di wilayah pesisir Kota Singkawang tidak hanya berkaitan dengan potensi sumber daya laut, tetapi juga dengan tata kelola lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor. Kewenangan pengelolaan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sementara pemerintah kota tetap menjadi aktor yang dekat dengan nelayan, pelaku pengolahan hasil laut, pedagang ikan, dan isu lingkungan pesisir. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antara kewenangan formal dan kebutuhan faktual masyarakat di tingkat lokal.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa tantangan *blue economy* di Singkawang mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu pendampingan administratif bagi nelayan, pengelolaan sampah laut, penguatan nilai tambah hasil laut, tata kelola pasar ikan, dan pengelolaan ekosistem mangrove. Nelayan dan pelaku ekonomi pesisir menghadapi tantangan berupa cuaca tidak menentu, fluktuasi harga ikan, keterbatasan akses administratif, kebutuhan rekomendasi BBM, serta persoalan sampah plastik di laut. Di sisi lain, terdapat peluang penguatan ekonomi pesisir melalui pengolahan hasil laut, ekonomi sirkular sampah laut, dan pengelolaan mangrove berbasis komunitas.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan tata kelola *blue economy* di Singkawang perlu diarahkan pada pembagian peran yang lebih jelas antara tingkat kota, provinsi, dan pusat. Pada tingkat kota, penguatan dapat difokuskan pada pendampingan administratif nelayan, fasilitasi rekomendasi BBM, penguatan tata

kelola pasar ikan, pengelolaan sampah laut, serta pendampingan pengolahan hasil laut dan legalitas produk secara bertahap sesuai skala usaha mikro. Pada tingkat provinsi, penguatan dapat diarahkan pada koordinasi pengelolaan wilayah laut 0–12 mil, dukungan pengawasan sumber daya perikanan, fasilitasi program pesisir, dan pengembangan potensi konservasi berbasis mangrove. Pada tingkat pusat, dukungan diperlukan dalam penyederhanaan prosedur, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, dan penyesuaian implementasi kebijakan *blue economy* dengan kondisi lokal, kapasitas nelayan kecil, karakteristik ekosistem pesisir, serta kebutuhan pelaku usaha mikro. Pembagian peran tersebut penting agar implementasi *blue economy* tidak berhenti pada program sektoral, tetapi menjadi agenda tata kelola yang menghubungkan pelayanan lokal, kewenangan wilayah laut, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, ekonomi sirkular sampah laut, konservasi mangrove, dan arah kebijakan nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini berfokus pada satu kasus kota pesisir, yaitu Kota Singkawang, sehingga temuan yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas pada seluruh wilayah pesisir di Indonesia. Kedua, penelitian ini lebih menekankan aspek tata kelola, koordinasi antarlembaga, dan pengalaman aktor lokal, sehingga belum mengukur secara kuantitatif dampak ekonomi dari program *blue economy* terhadap pendapatan nelayan, pelaku pasar ikan, dan pelaku pengolahan hasil laut. Ketiga, kajian mengenai potensi konservasi berbasis mangrove dan pendekatan OECM masih bersifat eksploratif karena membutuhkan data ekologis dan kelembagaan yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak ekonomi pengolahan hasil laut, efektivitas pendampingan legalitas produk bagi usaha mikro, potensi pengelolaan mangrove berbasis OECM, serta kontribusi program pengelolaan sampah laut terhadap penghidupan masyarakat pesisir.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dinas sektoral, organisasi nelayan, dan pelaku ekonomi pesisir dalam memperkuat tata kelola *blue economy* di Kota Singkawang. Pengelolaan pesisir perlu dilakukan secara lebih terintegrasi karena isu perikanan, rekomendasi BBM, pengolahan hasil laut, legalitas produk, sampah laut, pasar ikan, dan konservasi mangrove saling berkaitan. Pada tingkat kota, penguatan dapat diarahkan pada pendampingan administratif nelayan, fasilitasi rekomendasi BBM, tata kelola pasar ikan, pengelolaan sampah laut, serta pendampingan pengolahan hasil laut dan legalitas produk secara bertahap sesuai skala usaha mikro, seperti PIRT, sertifikasi halal, dan standar produksi dasar melalui dinas terkait. Pada tingkat provinsi, dukungan diperlukan melalui koordinasi pengelolaan wilayah laut 0–12 mil, pengawasan sumber daya perikanan, fasilitasi program pesisir, dan

pengembangan potensi konservasi berbasis mangrove. Pada tingkat pusat, implementasi kebijakan *blue economy* perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, kapasitas nelayan kecil, karakteristik ekosistem pesisir, dan kebutuhan pelaku usaha mikro agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara lebih responsif dan tidak membebani aktor lokal.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan gagasan *sustainable blue economy* sebagai kerangka untuk menilai apakah pemanfaatan sumber daya pesisir mampu menghubungkan tiga tujuan: manfaat ekonomi, perlindungan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Voyer et al., 2021; Evans et al., 2023). Kerangka ini dapat menjelaskan mengapa pendampingan nelayan, tata kelola pasar ikan, pengurangan sampah, dan konservasi mangrove harus dipahami sebagai satu agenda yang saling berkaitan. Dalam kasus Singkawang, kerangka tersebut terlihat berjalan secara parsial. Unsur ekonomi hadir melalui perikanan, perdagangan, dan pengolahan hasil laut; unsur sosial terlihat melalui pelayanan dan pendampingan nelayan; sedangkan unsur ekologis muncul melalui pengelolaan sampah dan mangrove. Namun, ketiga unsur tersebut belum terhubung dalam satu mekanisme kelembagaan yang konsisten.

Temuan ini sekaligus menunjukkan batas penjelasan teori *blue economy* apabila digunakan sendiri. Teori tersebut kuat dalam menjelaskan tujuan normatif pembangunan pesisir, tetapi kurang memadai untuk menjelaskan siapa yang harus bertindak ketika kewenangan tersebar pada pemerintah pusat, provinsi, kota, dan organisasi nonpemerintah. Karena itu, penelitian ini menambahkan perspektif *multi-level governance* untuk menjelaskan proses implementasinya. Perspektif ini menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan tidak selalu menghentikan kebijakan, tetapi menghasilkan ketergantungan antartingkat pemerintahan dan mendorong pemerintah kota menjalankan peran penghubung melalui pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi. Kontribusi penelitian ini adalah merevisi pemahaman *blue economy* dari sekadar integrasi tujuan ekonomi-sosial-ekologis menjadi integrasi tujuan sekaligus integrasi kewenangan. Tanpa mekanisme penghubung lintas tingkat dan lintas sektor, prinsip *blue economy* cenderung berjalan sebagai program yang terpisah-pisah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fajar Ramdhan, S.IP., M.IP., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, serta Ahmad Imam Anriza dan Rizqi Alfiatun atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan waktu, informasi, dan pandangan selama proses pengumpulan data, termasuk unsur DKP Kota Singkawang, DKP Provinsi Kalimantan Barat/UPT Konservasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Singkawang, HNSI, nelayan, pedagang ikan, pelaku pengolahan

hasil laut, serta aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Singkawang. Seluruh masukan dari narasumber sangat membantu penulis dalam memahami dinamika tata kelola *blue economy* di tingkat lokal.

REFERENCES

- Albotoush, R., & Shau-Hwai, A. T. (2021). An authority for marine spatial planning (MSP): A systematic review. *Ocean & Coastal Management*, 205, 105551. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105551>
- De Ycaza, R. A., Spalding, A. K., & Cisneros-Montemayor, A. M. (2024). Assessing policy coherence for developing a *blue economy*: A case study in the Republic of Panama. *Frontiers in Marine Science*, 11, Article 1336030. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1336030>
- Dudayev, R., Pane, B., Gammage, T., Gurney, G. G., & Adhuri, D. S. (2025). Community-led marine OECMs: Assessing enabling regulatory frameworks and potential cases in Indonesia. *Parks: the international journal of protected areas and coservation*, 31, 97-108. e: <https://doi.org/10.2305/IHOJ4854>
- Eger, S. L., de Loë, R. C., Pittman, J., Epstein, G., & Courtenay, S. C. (2021). A systematic review of integrated coastal and marine management progress reveals core governance characteristics for successful implementation. *Marine Policy*, 132, 104688. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104688>
- Evans, L. S., Buchan, P. M., Fortnam, M. P., Honig, M., & Heaps, L. (2023). Putting coastal communities at the center of a sustainable *blue economy*: A review of risks, opportunities, and strategies. *Frontiers in Political Science*, 5, Article 1032204. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1032204>
- Frohlich, M. F., Fidelman, P. I. J., Dutton, I. M., Rissik, D., & Vince, J. Z. (2023). A network approach to analyse Australia's *blue economy* policy and legislative arrangements. *Marine Policy*, 149, 105588. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105588>
- Halim, A., Loneragan, N. R., Wiryawan, B., Hordyk, A. R., & Sondita, M. F. A. (2020). Transforming traditional management into contemporary territorial-based fisheries management rights for small-scale fisheries in [Indonesia]. *Marine Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103923>
- Kartika, I., Adhuri, D. S., Adrianto, L., Agung, F., Ahmadia, G. N., Bejarano, S., ... & Ferse, S. C. (2024). Prospective ecological contributions of potential marine OECMs and MPAs to enhance marine conservation in Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 258, 107411.
- Kusumadewi, S. D., Purnomo, H., Nadhira, S., & Putrizulfan, R. (2024). Systematic review on the implementation of mangrove community-based restoration in Indonesia and beyond. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1315(1), 012052. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1315/1/012052>
- OECD. (2024). *The blue economy in cities and regions: A territorial approach*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bd929b7d-en>
- Prabawati, A., Frimawaty, E., & Haryanto, J. T. (2023). Strengthening stakeholder partnership in plastics waste management based on circular economy

- paradigm. *Sustainability*, 15(5), 4278. <https://doi.org/10.3390/su15054278>
- Sutisna, N., Firdaus, M. A., & Sundarta, M. I. (2025). Legal frameworks for sustainable *blue economy*: Harmonizing maritime resource governance and environmental protection. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1566(1), 012005. [10.1088/1755-1315/1566/1/012005](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1566/1/012005)
- Voyer, M., Quirk, G. C., Farmery, A. K., Kajlich, L., & Warner, R. M. (2021). Launching a *blue economy*: Crucial first steps in designing a contextually sensitive and coherent approach. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 23(4), 496–510. [10.1080/1523908X.2020.1856054](https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1856054)
- Wahyuni, S., Umiyati, S., & Wahyuni, E. S. (2026). Circular economy policy for sustainable development of coastal community from *blue economy* perspective. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1585(1), 012039. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1585/1/012039>
- Wasik, Z., Gunawan, S., & Handriana, T. (2024). *Blue economy* and the impact of industrialisation on sustainable livelihoods: A case study of fisheries in the North Coastal Region of Java. *Journal of Ecohumanism*, 3(8). [10.62754/joe.v3i8.4925](https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4925)
- Pemerintah Kota Singkawang. (2025). Masterplan Pengembangan TPA Wonosari Kota Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang.
- Yin, R. K., Campbell, & Thomas, D. (2018). *Case study research and applications : design and methods Sixth edition*. (Sixth edit). SAGE Publications.